

Mal-Praktek Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Perspektif Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP): Studi Kasus di Sekolah Dasar Negeri 01 Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi

Abdul Khoir HS. & Acep Mulyadi

Abstract: This study will discuss about the Mal-Practice in Islamic Education Learning Education: KTSP perspective. A case study in Public Elementary School 01 South Tambun-Bekasi. Educational malpractice is commonly defined as the failure to adequately educate a student. Malpractice has been defined as: - Professional misconduct or unreasonable lack of skill. Failure of one rendering professional service to exercise that degree of skill and learning commonly applied under all the circumstances in the community by the average prudent reputable member of the profession with the result of injury, loss or damage to the recipient of those services or to those entitled to rely upon them. Based on the findings obtained from empirical observations can be put forward some conclusions follow: First, in all that level (elementary, middle and high school) curriculum elements that have not been properly implemented (a) preparation of curriculum development, (b) the development of the syllabus, (c) development, (d) integrated learning, (e) the development of local content, (f) the preparation of the draft assessment of learning outcomes, (g) preparation of students. Secondly, the learning process that takes place using the curriculum in the province of Jambi carried out in accordance with fundamental principles of modern pedagogy and which stresses the importance of planning, implementation, and evaluation right. This can be indicated from (1) completeness of preparation of teachers (Unit Events Lessons/learning scenario), materials (Student Activity Sheet), and the media that teachers use to implement learning activities, (2) compliance with the scenario of learning and teaching varied teaching methods used by teachers, and (3) accuracy in the provision of duty, the utilization of learning resources, and the use of appropriate evaluation tools to get feedback from students. However, from the perspective of quality is still needed guidance.

Pendahuluan

Salah satu perubahan yang signifikan dalam bidang Pendidikan Pasca reformasi 1998 adalah perlunya reformasi budaya melalui reformasi pendidikan. Reformasi pendidikan diartikan sebagai perubahan yang mendasar terhadap pokok persoalan pendidikan nasional. Tanggapan terhadap tuntutan itu, pemerintah melalui keputusan DPR-RI pada tanggal 11 Juni 2003 menetapkan undang-undang nomor 20

tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS). Melalui undang-undang itu diharapkan penyelenggara maupun *stakeholders* pendidikan dapat mengacunya untuk pencapaian tujuan pendidikan nasional yakni berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara

yang demokratis serta bertanggung-jawab¹.

Demokratisasi dan desentralisasi menjadi kata kunci perubahan paradigma dalam pendidikan. Hal ini berarti peranan pemerintah akan dikurangi dan memperbesar partisipasi masyarakat. Peranan pemerintah pusat yang sentralistik yang berlangsung selama 50 tahun lebih akan diperkecil dengan memberikan peranan yang lebih besar kepada pemerintah daerah yang dikenal dengan sistem desentralisasi.

Bukti konsep demokratisasi dalam pengelolaan pendidikan, kemudian dituangkan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam bab III tentang prinsip penyelenggaraan pendidikan (pasal 4) khususnya pada ayat 6 bahwa pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.²

Untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu, maka pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib memfasilitasi satuan pendidikan dengan pendidikan dan tenaga kependidikan yang diperlukan (pasal 42 ayat 2). Perubahan yang cukup mendasar dari sistem pendidikan nasional masih memerlukan waktu cukup lama dalam implementasinya. Peran pemerintah daerah dan masyarakat dalam mempercepat proses peningkatan mutu

pendidikan sebagaimana yang diharapkan undang-undang masih terkesan parsial. Walaupun demikian dalam kurun waktu lima tahun terakhir, perkembangan pendidikan pada umumnya dan pendidikan dasar pada khususnya telah menunjukkan kemajuan, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Peningkatan mutu pendidikan secara menyeluruh menuntut antara lain upaya sistemik dalam hal persiapan, pembinaan, dan pengembangan kompetensi sejumlah besar guru, kepala sekolah, dan pengawas, untuk dapat menjamin terselenggaranya program pendidikan yang berkualitas tinggi di sekolah. Hal ini akan memungkinkan mereka menjalankan fungsinya secara efektif dalam menyelenggarakan dan mengembangkan proses pembelajaran yang relevan dan tanggap terhadap kebutuhan individu dan masyarakat yang senantiasa berubah.

Peningkatan dan pemerataan kualitas sekolah dasar merupakan kepedulian utama pemerintah dan juga masyarakat, sebab fungsi sekolah dasar sebagai fondasi penting pendidikan sekolah jenjang berikutnya. Kualitas dan keberadaannya menjadi sangat penting untuk diperhatikan sebagai strategi pengembangan sumber daya manusia.

Keberhasilan belajar menjadi tolok ukur adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Usaha-usaha untuk itu pun telah ditempuh dengan berbagai cara, di antaranya meningkatkan kualitas kemampuan guru, penggunaan media pembelajaran yang tepat, menggunakan model-model pendekatan pengajaran yang efektif dan sebagainya. Namun demikian masih saja dijumpai sejumlah anak yang tidak dapat mengikuti pelajaran dengan baik. Hal ini dikarenakan

¹ UU Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003

² Departemen Agama RI, *Memahami Paradigma Baru Pendidikan Nasional dalam Undang-undang SISDIKNAS* (Jakarta: Dirjen Kelembagaan Agama Islam, 2003), h. 2-3.

berbagai masalah, baik masalah dari dalam maupun masalah yang disebabkan dari luar diri siswa.

Idealisasi tujuan pendidikan nasional menjadi patokan besar keberhasilan pendidikan di tanah air, namun tujuan ini harus menurunkan kebijakan yang lebih operasional di level kementerian hingga kesatuan pendidikan (sekolah). Karena itu dirumuskan dan dilaksanakannya formula desain kurikulum yang dianggap mengakomodir perkembangan pendidikan kekinian dan diharapkan mampu menjawab perkembangan pendidikan di masa akan datang menjadi keniscayaan.

Bentuk kebijakan terhadap tujuan pendidikan ini kemudian diuraikan kedalam kurikulum baik makro maupun mikro hingga pada level satuan pendidikan (sekolah). Konsep Kurikulum yang dimaksud saat ini adalah apa yang dinamakan dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan yang di singkat KTSP. Berdasarkan Peraturan Menteri nomor 24 tahun 2006 tentang pelaksanaan permen nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi dan permen nomor 23 tahun 2006 tentang standar kompetensi lulusan maka KTSP dilaksanakan mulai tahun ajaran 2006/2007.

Semangat yang dipesankan dari implementasi KTSP ini adalah memposisikan sekolah dan guru dalam mengoptimalkan perannya sebagai penentu keberhasilan peserta didik yang disesuaikan dan diadaptasikan dengan kondisi sekolah, masyarakat, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama teknologi informasi yang berkembang

sangat pesat bersamaan dengan era globalisasi³.

Mengingat konsekuensi pelaksanaan KTSP menjadi tugas utama tingkat satuan pendidikan (sekolah) maka sekolah dituntut mempersiapkan tenaga kependidikan yang dimilikinya terutama Guru bidang Studi untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan baik secara teoritis maupun praktis. Memahami secara **teoritis** tentang kurikulum mengharuskan guru membaca dan mendalami lagi tentang hakikat pendidikan, memperkaya wawasan tentang model-model pembelajaran mutakhir, dan tentu saja inovasi kurikulum sebagai usaha penyesuaian terhadap perkembangan zaman. Sedangkan kemampuan **praktis** menuntut guru pada kemampuan penyusunan kurikulum pembelajaran bidang studi yang diampunya sesuai dengan format KTSP. Kedua konsekuensi ini sangat mempengaruhi kualitas penyusunan KTSP sebagai dokumen tertulis yang dimiliki sekolah untuk selanjutnya menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan pembelajaran paling tidak untuk satu tahun ajaran di tingkat satuan pendidikannya. Lebih jauh pemahaman dan kemampuan itu akan terus di uji pada tingkat pelaksanaannya. Sedianya kualitas pemahaman dan kemampuan praktis terhadap model kurikulum terbaru (KTSP) akan meningkatnya kualitas pembelajaran yang dilaksanakan. Belajar menjadi efektif, menggairahkan dan menyenangkan baik bagi siswa maupun guru.

³ E. Mulyasa, *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan; suatu panduan praktis* (PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2007)

Pada level inilah dijabarkan desain pembelajaran (kurikulum) pada masing-masing bidang studi. Demikian halnya dengan bidang studi Pendidikan Agama Islam. sebagai rujukan utama dalam penyusunan kurikulum baik untuk tingkat Satuan Pendidikan hingga Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP).⁴

Sejatinya pendidikan Agama Islam sebagaimana dalam sistem pendidikan di Indonesia, Pendidikan Agama Islam merupakan salah satu bidang studi yang harus dipelajari dalam rangka menyelesaikan pendidikan pada tingkat tertentu, yang didesain dan diberikan kepada pebelajar yang beragama Islam agar mereka dapat mengembangkan dan meningkatkan keberagamaannya.⁵

⁴KTSP merupakan penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya yang mengacu kepada tujuan umum pendidikan, yakni 1. Tujuan pendidikan dasar adalah meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. 2. Tujuan pendidikan menengah adalah meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut, dan 3. Tujuan pendidikan menengah kejuruan adalah meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya.

⁵ Irfan Abd.Gafar, Muhammad Jamil B, *Re-Formulasi Rancangan Pembelajaran Pendidikan Agama*

Materi Pendidikan Agama Islam dapat diberikan dalam satu bidang studi secara utuh dalam beberapa bidang studi secara terpisah, baik oleh guru yang sama maupun beberapa guru yang berbeda.

Muhammad Fadhil Al-Jamaly mendefinisikan pendidikan agama Islam sebagai upaya mengembangkan, mendorong serta mengajak peserta didik hidup lebih dinamis dengan berdasarkan nilai-nilai yang tinggi dan kehidupan yang mulia. Dengan proses tersebut, diharapkan akan terbentuk pribadi peserta didik yang lebih sempurna, baik yang berkaitan dengan potensi akal, perasaan, maupun perbuatan. Sedangkan menurut Ahmad Tafsir mendefinisikan pendidikan Islam sebagai bimbingan yang diberikan oleh seseorang agar ia berkembang secara maksimal sesuai dengan ajaran Islam.⁶

Namun demikian masih dijumpainya perilaku siswa yang tidak sesuai dengan nilai-nilai agama Islam. Pada hal mereka sudah mendapatkan materi mata pelajaran Agama Islam di sekolahnya. Persoalan ini menarik untuk dikaji lebih jauh. Apakah kejadian tersebut berawal dari desain pembelajarannya yang tidak sesuai dengan pedoman yang diberikan atau faktor gurunya yang tidak kompeten dalam memberikan pengajaran? Sering kali penelitian menemukan bahwa jika terjadi kegagalan dalam pencapaian tujuan pembelajaran, maka kemungkinannya ada pada desain kurikulumnya atau kompetensi gurunya.

Islam, (Jakarta: Nur Insani, 2003), h. 70

⁶ Al-Rasyidin, Syamsyul Nizar, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Ciputat: PT. Ciputat Press, 2005), h. 32

Kualitas penyusunan desain kurikulum yang baik menentukan pelaksanaan pembelajaran yang baik pula. Rendahnya kualitas penyusunan kurikulum akan berakibat buruknya pelaksanaan pembelajaran. Oleh karena itu keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan pembelajaran sangat ditentukan oleh kualitas guru dalam menyusun kurikulum satuan pendidikan. Ketidak sesuaian antara konsep KTSP dengan hasil penyusunan dokumen KTSP ini adalah kegagalan pertama. Pelaksanaan KTSP yang tidak sesuai bahkan gagal dalam mencapai tujuan pembelajaran (standar kompetensi dan kompetensi dasar) adalah kegagalan berikutnya. Ketidak sesuaian antara dokumen konsep KTSP dengan implementasinya inilah yang peneliti maksud dengan **Malapraktik Pembelajaran**.

Pertanyaannya adalah apakah guru sudah memahami dan mengerti tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan?, apakah guru sudah cukup beradaptasi dengan lingkungan sekolah sebagai inspirasi yang memboboti kualitas penyusunan kurikulum?, dan apakah guru telah mengerti secara praktis penyusunan kurikulum pada bidang studi sesuai dengan KTSP?

Secara spesifik persoalan di atas dapat terjadi pada kualitas penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan pelaksanaan pembelajaran bidang studi Pendidikan Agama Islam (PAI) yang disajikan untuk siswa sekolah dasar baik negeri maupun swasta.

Pemahaman dan kemampuan secara praktis tentang KTSP yang rendah pada guru Agama Islam di sekolah dasar tentu akan berkontribusi pada kegagalan pencapaian tujuan pembelajaran atau Standar Kompeten-

si dan Kompetensi Dasar Pendidikan Agama Islam.

Untuk menguji dugaan diatas maka perlu dilakukan penelitian agar dapat menggambarkan lebih jelas tingkat pemahaman dan kemampuan guru Agama Islam khususnya di sekolah dasar negeri terhadap KTSP dan menguji bagaimana efektifitas pelaksanaannya. Oleh karena itu penelitian ini menarik judul "**Malapraktik Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Perspektif Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP): Studi Kasus di Sekolah Dasar Negeri 01 dan 10 di kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi**".

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis data-data penelitian KTSP dan penerapannya bagi sekolah-sekolah penyelenggara dapat dikategorikan menjadi tiga bagian. Bagian pertama adalah mendiskripsikan tentang profil pelaksanaan KTSP di sekolah dasar, kedua sekolah menengah pertama dan ke tiga adalah profil implementasi KTSP pada sekolah menengah atas.

Beberapa aspek penting yang menjadi pertimbangan dalam penelitian ini adalah profil sekolah, kesiapan sekolah, pemahaman guru tentang KTSP, sarana dan prasarana serta model pembelajaran yang telah dilaksanakan di kelas oleh guru. Selanjutnya mencermati kendala-kendala yang dihadapi oleh sekolah serta upaya-upaya untuk mengatasinya dengan melihat peran komponen terkait dengan pelaksanaan KTSP di sekolah dalam Provinsi Jambi.

Profil Implementasi KTSP di Sekolah Dasar

Secara umum sekolah dasar (SD) yang dijadikan sampel penelitian

untuk semua Kabupaten dan Kota dalam Provinsi Jambi terdapat beberapa persoalan terkait dengan dua hal:

Pertama, kesiapan sekolah dalam menyiapkan dokumen KTSP. Kewenangan yang diberikan kepada sekolah adalah menyiapkan dokumen penataan kelembagaan sekolah untuk merumuskan visi dan misi sekolah serta menyiapkan daya dukung sekolah. Sebanyak 98% sekolah dasar yang dijadikan sampel telah merumuskan visi dan misi sekolah. Dokumen disusun diperoleh dari berbagai sumber. Salah satunya adalah bersumber dari membeli dokumen KTSP. Sebagain diperoleh melalui penataran KTSP.

Kendala yang mengemuka tentang penyusunan dokumen penataan kelembagaan sekolah adalah belum adanya Tim Pengembang KTSP di sekolah. Kepala sekolah pada umumnya belum semuanya mendapatkan pelatihan tentang KTSP. Keterbatasan akses sekolah dalam mendapatkan informasi-informasi tentang perubahan kurikulum masih dijumpai di tingkat sekolah, kendatipun secara geografis letak sekolah berada di kota.

Kedua, Keengganan dalam menyusun KTSP di sekolah dipengaruhi oleh tidak tersedianya dana yang memadai untuk menyusun dokumen serta kurangnya pembinaan dari pihak pengawas dan DIKNAS Kabupaten Kota. Padahal peran tersebut sangat diharapkan oleh sekolah. Kondisi ril dilapangan menunjukkan bahwa terdapat beberapa sekolah dasar yang membeli perangkat dokumen KTSP dari berbagai penerbit yang harganya cukup mahal (foto dokumen terlampir).

Persoalan bagi guru yang paling dominan adalah menumbuhkan

pembuatan model-model pembelajaran bagi guru. Kondisi ini menambah persoalan dalam implementasi KTSP di sekolah. Guru cenderung belum memanfaatkan model pembelajaran berbasis kearifan lokal serta belum tumbuh inovasi dalam pembuatan model pembelajaran. Padahal, kunci suksesnya pelaksanaan KTSP adalah inovasi pembelajaran yang terpusat pada siswa. Contohnya, pembelajaran IPA yang masih bersifat klasikal, belum memanfaatkan potensi alam sebagai sumber belajar. Ada beberapa sekolah yang sudah mendapatkan bantuan model pembelajaran namun belum termanfaatkan secara optimal. Hal ini, disebabkan oleh kekurangmampuan guru dalam mengadopsi perangkat pembelajaran yang dihibahkan. Keengganan pemanfaatan pembelajaran inilah menambah rumitnya penerapan KTSP di sekolah. Target agar sekolah yang mendapatkan bantuan peralatan pembelajaran agar ditularkan kepada sekolah lain belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Selanjutnya dalam menyikapi tentang kurikulum muatan lokal terdapat miskonsepsi. Adanya kesalahan persepsi tentang kurikulum muatan lokal akibat minimnya informasi tentang kurikulum muatan lokal. Misalnya pelajaran Iqra', Olahraga dan Kesenian di jalankan sebagai mata pelajaran muatan lokal padahal mata pelajaran tersebut merupakan kategori mata pelajaran pengembangan kepribadian. Adanya keterbatasan buku/bahan rujukan muatan lokal merupakan kendala paling besar dalam menerapkan KTSP pada jenjang pendidikan dasar. Seyogyanya muatan lokal disusun sesuai dengan potensi daerah dan ketersediaan bahan yang ada, yang dapat dijadikan sebagai

mata pelajaran keunggulan kompetitif. Pada umumnya muatan lokal yang dikembangkan di sekolah dasar adalah budaya dan seni daerah.

Persoalannya tentang pengembangan budaya dan seni daerah adalah **belum tersedianya buku rujukan yang memadai**. Sehingga sangat tidak mungkin bila menerapkan buku rujukan budaya daerah dari tempat lain yang struktur dan budayanya berbeda. Kondisi ini diperparah oleh **keterseediaan guru yang memiliki kompetensi dan kualifikasi bidang studi/mata pelajaran muatan lokal**. Peran Dinas Pendidikan Kabupaten Kota semestinya sudah melakukan inventarisasi tentang kebutuhan sekolah.

Mencermati struktur kurikulum masih sepenuhnya merujuk dan mengadopsi struktur kurikulum yang tersedia. Kondisi ini disebabkan oleh belum tersosialisasinya dengan baik tentang KTSP ke sekolah-sekolah dan para guru yang memberikan berbagai dampak.

Misalnya, dampak yang ditimbulkan belum terbentuknya tim pengembang tingkat kabupaten dan kota serta belum adanya bantuan nara sumber yang memadai bagi guru-guru terutama dalam pengembangan model-model pembelajaran dan sistem penilaian mengakibatkan terjadinya stagnasi dalam implementasi KTSP. Beberapa faktor penting penghambat implementasi KTSP adalah minimnya buku paket yang relevan dengan tuntutan KTSP serta belum lengkapnya sarana dan prasarana pembelajaran serta sesuai dengan persyaratan minimal merujuk pada UU No. 23 Tahun 2003 (Delapan Standar Pelayanan Minimal). Terjadinya miss konsepsi tentang muatan lokal, padahal mata pelajaran pengembangan

kepribadian dijalankan sebagai mata pelajaran muatan lokal.

Profil Implementasi KTSP di Sekolah Menengah Pertama

Tidak jauh beda kondisi yang dialami oleh sekolah-sekolah penyelenggara KTSP pada tingkat SD dengan tingkat SMP. Persolan yang mengemuka adalah minimnya sosialisasi KTSP pada tingkat sekolah maupun guru. Pemahaman KTSPpun cukup beragam terkait dengan konsep dasar filosofis maupun teknis pelaksanaan KTSP di sekolah. Dalam hal penataan sekolah perumusan tujuan, visi dan misi sekolah belum terjabarkan secara implementatif dan terukur tentang upaya-upaya apa saja yang harus ditempuh dan pencapaiannya.

Adanya kerancuan antara pengembangan muatan lokal dengan pengembangan kepribadian dalam elemen-elemen KTSP. Padahal harapan dari KTSP adalah tumbuhnya matapelajaran muatan lokal secara beragam di tiap-tiap sekolah, atau paling tidak pada tiap kabupaten. Kondisi ini terjadi karena buku rujukan tentang muatan lokal sangat minim. Team pengembang muatan lokal belum tersedia baik pada tingkat sekolah maupun Diknas Kabupaten/Kota.

Pada tingkat guru persoalan yang mendasar adalah guru sangat membutuhkan pelatihan tentang penyusunan RPP dengan menggunakan kata-kata operasional yang tepat terkait dengan model-model pembelajaran secara terpadu. Kendala kedua adalah tentang pemahaman sistem penilaian secara format maupun hakekat penilaian sesuai amanat KTSP. Disamping itu, forum komunikasi guru bidang studi tidak berjalan

sebagaimana mestinya, kendala utamanya adalah masalah pendanaan dan kurangnya team pakar yang seharusnya dapat diatasi melalui *peer teaching*.

Kurangnya sarana dan prasarana pembelajaran pada umumnya terkait dengan bidang studi. Pada umumnya untuk matapelajaran Sains sarana laboratorium kurang memadai. Inilah salah satu kendala pelaksanaan pembelajaran yang terintegrasi tidak berjalan sebagai mana mestinya. Sarana lain yang kurang memadai adalah pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Pada umumnya jaringan internet belum terbangun di tiap sekolah sehingga pemanfaatan TIK sebagai sumber belajar bagi siswa belum sepenuhnya dilaksanakan.

Profil Implementasi KTSP di Sekolah Menengah Atas

Dalam tataran sosialisasi KTSP belum sepenuhnya semua sekolah yang menyelenggarakan KTSP belum tersosialisasi dengan baik. Beberapa elemen-elemen penting dalam KTSP belum sepenuhnya difahami oleh sekolah. Bimbingan teknis tentang penyusunan KTSP di sekolah sangat dibutuhkan. Adapun elemen-elemen tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Elemen-elemen KTSP

No	KTSP	Komponen Utama
1.	Dokumen Satu	Penyusunan Pengembangan KTSP Pengembangan Muatan Lokal
2	Dokumen Dua	Pengembangan Silabus Pengembangan Pembelajaran Terpadu Pengembangan Laporan Belajar Peserta Didik Penyusunan Rancangan Penilaian Hasil Belajar Siswa

Dalam konteks kelembagaan di tingkat sekolah sebagian besar sekolah belum terbentuk team pengembang KTSP. KTSP disusun secara sepenuhnya merujuk pada BNSP dan belum diimbangi oleh inovasi dan kreativitas penyusunan yang berbasis pada kekuatan sekolah penyelenggara. Misalnya, perumusan visi dan misi belum terjabarkan dengan baik dalam rencana strategis sekolah secara terukur pencapaiannya.

Pada tingkat guru masih dibutuhkan bimbingan tentang merumuskan kata-kata operasional dalam menyusun desain instruksional. Padahal, pemilihan kata-kata operasional sangat penting untuk menentukan ketepatan dalam merumuskan tujuan pembelajaran dan kompetensi yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran. Kondisi ini diperparah oleh kurangnya pemahaman tentang pembuatan model-model pembelajaran secara terpadu dan terintegrasi untuk semua bidang studi.

Disamping itu, pemahaman bagi guru tentang sistem penilaian dengan model KTSP belum sepenuhnya diikuti oleh guru. Kurangnya sosialisasi tentang KTSP bagi guru-guru sebagai faktor utamanya. Padahal, memahami secara komprehensif tentang KTSP baik di tingkat sekolah, perencanaan, pelaksanaan dan sistem evaluasi sangat penting. Terutama pemahaman bagi guru sebagai pelaku agar KTSP dapat berjalan sebagaimana yang telah diamanatkan. Secara siklus kurikulum, KTSP dapat digambarkan dalam satu alur sebagai berikut, gambar 1:

Implementasi KTSP dalam Perspektif Kebijakan

Persoalan-persoalan implementasi KTSP yang *urgen* untuk diketengahkan pada konteks ini sejatinya

bermuara pada kesiapan daerah Jambi dalam mengantisipasi perubahan paradigma pendidikan dari yang semula sentralistik menjadi desentralistik. Misalnya, KTSP yang diluncurkan lebih mengedepankan pada otonomi sekolah untuk mengembangkan kurikulum sendiri yang sesuai dengan kearifan lokal, kurikulum sekolah tidak lagi terpusat secara nasional. Sekolah bisa membuatnya sendiri dengan meminta pertimbangan komite sekolah. Peran guru adalah sebagai fasilitator untuk mendorong anak mau belajar dan mencari tahu (*Kompas*, 29/2/2007). Setiap elemen-elemen tersebut belum berjalan sebagaimana mestinya.

Perubahan paradigma tersebut memberikan konsekuensi pada aspek kebijakan dan implikasinya dalam pelaksanaan praksis pendidikan. Kebijakan pendidikan di daerah semestinya lebih mengutamakan dimensi kemandirian yang didasarkan kepada analisis kebutuhan dan potensi yang dapat dikembangkan di daerah Jambi. Demikian juga dengan pengembangan KTSP. Selama ini, sebagian sekolah yang mencoba KTSP masih mengadopsi model kurikulum yang dicontohkan oleh Badan Standar Nasional Penilaian (BSNP). Padahal, kondisi setiap daerah amat beragam. Setiap daerah memiliki kekhasan masing-masing.

Dengan demikian kurikulum yang dikembangkan dan digunakan semestinya selaras dengan keanekaragaman karakteristik daerah Jambi. Pada tataran implikasi, perubahan tersebut mensyaratkan para pengambil kebijakan dan *stake holder* memiliki kemampuan untuk dapat menerjemahkan kebijakan-kebijakan pusat dan lokal menjadi perangkat-perangkat aturan

yang dapat dipedomani untuk melaksanakan pendidikan.

Prinsip Dasar dan Ranah Pembelajaran KTSP Komponen yg terlibat dlm KTSP PGRI Komunitas lokal Penasehat Pendidikan Ortu Siswa Komite Skl Proses KTSP -desain -pelaksanaan -evaluasi Menghasilkan Kurikulum KebutuhanMatapelajaran Taksonomi Bloom Potensi Komunitas Pembelajaran Teknologi Penelitian Persyaratan Model Pemanfaatan sarana PembelajaranRefleksi Penggunaan

Kondisi riil menunjukkan bahwa perubahan paradigma tersebut tidak serta merta diikuti dengan hasil yang lebih baik. Sejumlah masalah masih mengedepan dan dominan mewarnai kebijakan pendidikan dan implementasinya di Jambi, baik pada tataran provinsi, kota, maupun kabupaten. Pertama, tidak semua sektor yang menentukan arah kebijakan pendidikan dan implementasinya memiliki SDM yang kompeten untuk dapat memformulasikan kebijakan dan implikasi teknisnya di lapangan. Perancang dan pengambil kebijakan pada sektor-sektor yang vital untuk mengembangkan pendidikan di sebagian daerah tidak memahami benar esensi dan filosofi dalam ranah pendidikan. Akibatnya, produk kebijakan yang dihasilkannya pun kurang tepat sasaran.

Kedua, intervensi politik kian dominan dalam penentuan kebijakan dan implementasinya. Dalam konteks ini, seiring dengan kecenderungan otonomi daerah, mata rantai birokrasi sangat memungkinkan terjadinya dominasi kekuasaan politik terhadap pendidikan. Sekolah mana dan jenis apa yang perlu dikembangkan di wilayah tertentu, misalnya, tidak selamanya didasarkan pada hasil

evaluasi yang cermat dari perspektif keilmuan dan kesiapan objektif dan daya dukung lingkungan. Ini berakibat pada ketidaktepatan dalam pengambilan keputusan dalam penentuan arah pengembangan SDM dan kompetensi tertentu yang memberikan nilai tambah pada peningkatan kualitas pendidikan secara kontekstual.

Selain dua persoalan di atas, berkenaan dengan penerapan KTSP yang semestinya mulai 2007 ini, Dinas Pendidikan dan sekolah sepertinya masih belum beranjak dari paradigma lama menunggu model baku KTSP yang siap saji untuk guru-guru pelbagai bidang studi. Dinas Pendidikan pun belum memetakan tingkat kesiapan sekolah-sekolah dalam penerapan KTSP. Padahal pemetaan itu sangat penting untuk mengidentifikasi sekolah-sekolah mana yang siap atau tidak siap melaksanakan Kurikulum 2006 atau lebih dikenal dengan sebutan KTSP.

Namun, tidak hanya di Jambi, secara nasional masih banyak sekolah yang belum siap melaksanakan KTSP. Sahabat kita, Mungin Eddy Wibowo anggota BSNP, mengungkapkan bahwa pemetaan kemampuan sekolah-sekolah di daerah untuk menyusun KTSP itu perlu. Akan tetapi, justru di daerah ada kepala dinas pendidikan yang justru bingung bagaimana menerapkan KTSP (*Kompas*, 29/2/2007). Kenyataan ini tentu menambah masalah dan tidak tertutup kemungkinan dihadapi juga oleh Dinas Pendidikan di Jambi.

Sesungguhnya, selain persoalan komitmen, dalam penerapan KTSP peran Diknas dan sekolah amat dominan. Diknas seyogyanya memprioritaskan dilakukannya studi untuk mengkaji tingkat kesiapan sekolah-sekolah, baik dari segi sarana

prasarana dan kesiapan SDM sekolah dalam mengadopsi kurikulum baru ini sehingga penerapan KTSP nantinya dapat tepat sasaran. Ini dapat dilakukan dengan melibatkan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK), Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP), dan *stake holder* dalam sinergi penelitian yang secara khusus ditujukan untuk memetakan kesiapan sekolah secara menyeluruh di wilayah kota dan kabupaten.

Selain itu, sekolah juga diharapkan proaktif mempersiapkan diri menyongsong perubahan kurikulum dengan sikap yang positif dan upaya yang mendukung keberhasilan perubahan itu ke arah yang lebih baik. Kepala sekolah dituntut untuk memfasilitasi dan berinisiasi meningkatkan kemampuan guru-gurunya agar dapat memiliki bekal dan kompetensi yang memadai, tidak saja terampil mengajar dengan menggunakan bahan ajar siap saji, melainkan juga dapat menyusun dan merencanakan sendiri pengajarannya.

Tidak hanya itu, karena KTSP memberi peluang sekolah untuk mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang ada di lingkungan sekitar, maka guru dituntut untuk memiliki kompetensi yang lebih kompleks dan adaptif terhadap perubahan. Semestinya, dengan diberlakukannya KTSP bisa merangsang guru benar-benar kreatif dalam memfasilitasi siswanya untuk belajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar yang tersedia di lingkungan sekitar. Bahkan, guru harus mempertimbangkan perbedaan-perbedaan pada peserta didik.

Kenyataan di sebagian sekolah menunjukkan bahwa pemahaman kepala sekolah dan juga guru masih

amat minim dalam pengetahuan tentang KTSP. Masih juga dipersoalkan hal-hal yang tidak substansial berkenaan dengan nama kurikulum (Kurikulum 2006 atau KTSP) dan mengapa Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) ditinggalkan. Padahal esensi dari perubahan itu tidak berpaling dari persoalan bagaimana membelajarkan siswa untuk mencapai kompetensi yang dituju, yang setidaknya meliputi ranah kognitif, afektif, dan psikomotor sesuai dengan jenjang pendidikan.

Untuk mengatasi itu diperlukan kemitraan yang erat antara Lembaga Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (LPTK) dan sekolah, yang difasilitasi oleh Dinas Pendidikan setempat. Realisasinya dapat berupa kerja sama dalam bentuk pelatihan guru-guru dan juga peningkatan kompetensi guru dengan mengikuti pendidikan setingkat sarjana (dan pascasarjana) yang sesuai dengan kebutuhan sekolah. Untuk itu, LPTK juga perlu menyelaraskan kurikulumnya dengan kompetensi guru dan pengelola sekolah, sehingga dapat memberi bekal yang gayut dengan kebutuhan di sekolah dasar dan menengah.

Dalam konteks penerapan KTSP, kemitraan dalam pelatihan dan pendidikan lanjut itu perlu didahului dengan analisis situasi yang diperoleh dari hasil penelitian objektif yang dapat memetakan masalah dan tingkat kesiapan sekolah yang akan menyelenggarakan KTSP. Setelah itu dapatlah diterapkan uji coba KTSP dengan mengambil sampel sekolah tertentu secara purposif, yakni dengan memilih sekolah yang sudah siap menerapkan KTSP di setiap kabupaten. Atau, KTSP dicobakan hanya dalam satu kabupaten saja terlebih dahulu. Keduanya memiliki

keunggulan dan kelemahannya masing-masing. Selain kesiapan sarana, prasarana, dan SDM sekolah, prinsip yang semestinya diperhitungkan dalam memilih satu di antara kedua alternatif itu adalah prinsip keadilan dan pemerataan. Ini mengingat bahwa kebijakan apa pun yang diambil dalam konteks pendidikan senantiasa menghadirkan dampak sosial, ekonomi, dan politik yang akibatnya dirasakan oleh seluruh masyarakat Jambi.

Sebagai refleksi akhir perlu dikemukakan bahwa keberhasilan dunia pendidikan di Jambi menerapkan KTSP amat ditentukan oleh itikad baik dan ada tidaknya kemauan untuk mengubah orientasi menuju paradigma berpikir yang dilandasi falsafah otonomi. Reorientasi memungkinkan penyelenggaraan dan pendidikan di sekolah secara lebih efisien dan unggul dalam pengembangan potensi sesuai dengan konteksnya. Sanggupkah kita berubah menuju yang lebih baik? Sebagian jawabannya ada pada siap atau tidakkah kita menerapkan KTSP di Tanah Beradat ini.

Kesimpulan

Berdasarkan temuan yang diperoleh dari pengamatan empirik dapat dikemukakan beberapa simpulan berikut:

Pertama, pada semua jenjang bahwa (SD, SMP dan SMA) elemen-elemen KTSP belum terimplementasi dengan baik yakni (a) penyusunan pengembangan KTSP, (b) pengembangan silabus, (c) pengembangan diri, (d) pembelajaran terpadu, (e) pengembangan muatan lokal, (f) penyusunan rancangan penilaian hasil belajar, (g) penyusunan laporan peserta didik.

Kedua, proses belajar mengajar yang berlangsung dengan meng-

Mal-Praktek Pembelajaran Pendidikan Agama Islam
Perspektif Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP):
Studi Kasus di Sekolah Dasar Negeri 01 Kecamatan Tambun
Selatan Kabupaten Bekasi

gunakan KTSP di provinsi Jambi dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar pedagogi modern dan yang mengutamakan pentingnya perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang tepat. Hal ini dapat diindikasikan dari (1) kelengkapan persiapan mengajar guru (Satuan Acara Pelajaran/skenario pembelajaran), bahan ajar (Lembar Kegiatan Siswa), serta media yang digunakan guru untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran; (2) kesesuaian pembelajaran dengan skenario pembelajaran dan bervariasi metode pembelajaran yang digunakan oleh guru; dan (3) ketepatan dalam pemberian tugas, pemanfaatan sumber belajar, dan penggunaan perangkat evaluasi yang tepat untuk mendapatkan umpan balik dari siswa. Namun, dari perspektif kualitas masih dibutuhkan pembimbingan.

Daftar Pustaka

- Anonim, 2007. *Plus Minus KTSP*, Dunia Guru:
<http://www.duniaguru.com>
- Anonim, 2006. *Towards Piloting School based continuous assessment at middle basic level*, Conference an a Assesment in Education, 26-30 June, 2006.
- Anonim, 2007. *Satndards-Aligned Curriculum Development*, Illinois State Board of Education Website Resources:,
<http://www.isbe.net/sos/default.htm>
- Anonim, 2006. *BNSP dan Kepmendiknas*, Permen tentang KTSP, Jakarta.
- Fernandes, H.J.X. 1984. *Evaluation of Educational Program*. National Education Planning, Evaluation and Curriculum Development. Jakarta.
- Beane, 1996. *Dalam Catatan Kritis Kurikulum 2006*, Media Indonesia, 5 Oktober 2006 yang ditulis oleh Paulus Maridjan.
- Suhadi, I. 2006. Menyikapi KTSP Tantangan untuk Penyelenggaraan Pembelajaran yang Lebih Baik, *Journal Pendidikan Inovatif* , Vol 2. hal 236-242
- Cheong Cheng, Y, 1994. *Effectiveness of Curriculum Change in School: An Organizational Perspective*, International of Educational Management, Vol. 8, No. 3, hal. 26-34
- Bolstad, R. 2004. *School-Based Curriculum Development: Redifining the term for New Zealand Schools Today and Tomorrow*, paper presented at the conference of the New Zealand Association of Research in Education, 24-26 November 2004.
- Sutrisno. 2008. *Wawancara Khusus tentang KTSP sebagai Inovasi Pendidikan*, Jambi Ekspress, Januari 2008.
- Kunandar, 2007. *Guru Profesional, Implementasi KTSP dan Persiapan Menghadapi Sertifikasi Guru*, Rajagrafindopersada, Jakarta.

